

TUGAS AKHIR

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

***THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCY, INTERNAL CONTROL
SYSTEM AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT
INFORMATION SYSTEM (SIPD) ON THE QUALITY OF FINANCIAL
REPORTING AT BANTUL DISTRICT GOVERNMENT***



Usulan Penelitian

*Untuk Memenuhi Persyaratan Melakukan Penelitian Dalam Rangka
Penyusunan Skripsi Program Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik*

Diajukan Oleh:

AZZURA SALSABILA

NIM. 20/463761/SV/18080

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
INTISARI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Batasan Penelitian	7
I.4 Tujuan Penelitian.....	8
I.5 Manfaat Penelitian	8
I.6 Kerangka Penelitian	10
BAB II GAMBARAN UMUM.....	11
II.1 Kondisi Umum Penulisan	11
II.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul	12
II.1.2 Semboyan Pemerintah Kabupaten Bantul.....	13
II.2 Tinjauan Pustaka.....	15
II.2.1 Kompetensi SDM.....	15
II.2.2 Sistem Pengendalian Intern.....	16
II.2.3 SIPD	17
II.2.4 Penerapan SIPD	18
II.2.5 Kualitas Laporan Keuangan.....	18
II.3 Keaslian Penelitian	19
II.4 Hipotesis	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
III.1 Desain Penelitian	30
III.2 Jenis dan Sumber Data	30
III.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
III.4 Populasi dan Sampel.....	31
III.5 Definisi Operasional Variabel.....	32
III.5.1 Variabel Independen	32

III.5.2 Variabel Dependen	33
III.6 Instrumen Penelitian	35
III.6.1 Uji Validitas	35
III.6.2 Uji Realibilitas	36
III.7 Teknik Analisis Data.....	36
III.7.1 Uji Asumsi Klasik.....	37
III.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda	37
III.7.3 Uji Kelayakan Model.....	38
III.7.4 Koefisien Determinasi	39
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	40
IV.1 Deskripsi Data Penelitian	40
IV.1.1 Analisis Data Hasil Penelitian.....	47
IV.1.2 Statistik Deskriptif	48
IV.1.3 Uji Kualitas Data.....	49
IV.1.4 Uji Validitas.....	49
IV.1.5 Uji Reliabilitas	51
IV.1.6 Uji Asumsi Klasik	53
IV.1.7 Analisis Regresi Linier Berganda.....	54
IV.1.8 Uji Kelayakan Model	56
IV.1.9 Koefisien Determinasi.....	59
IV.2 Pembahasan	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
V.1 Kesimpulan	64
V.2 Saran.....	64
V.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul	64
V.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya	65
V.3 Keterbatasan Penelitian.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Keaslian Penelitian	21
Tabel III. 1 Rincian Operasional Variabel	33
Tabel IV. 2 Daftar OPD Kab. Bantul	40
Tabel IV. 3 Jenis Kelamin Responden	42
Tabel IV. 4 Usia Responden	43
Tabel IV. 5 Pendidikan Terakhir Responden.....	45
Tabel IV. 6 Jurusan Responden	46
Tabel IV. 7 Hasil Statistik Deskriptif.....	48
Tabel IV. 8 Hasil Uji Validitas	50
Tabel IV. 9 Hasil Uji Reliabilitas.....	52
Tabel IV. 10 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel IV. 11 Hasil Uji Heterokedastisitas	54
Tabel IV. 12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	54
Tabel IV. 13 Hasil Uji T	57
Tabel IV. 14 Hasil Koefisien Determinasi	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Kerangka Penelitian	10
---------------------------------------	----

Gambar IV. 1 Pie Diagram Jenis Kelamin Responden	43
--	----

Gambar IV. 2 Pie Diagram Usia Responden	44
---	----

Gambar IV. 3 Pie Diagram Pendidikan Terakhir Responden	46
--	----

Gambar IV. 4 Pie Diagram Jurusan Responden.....	47
---	----

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuisioner. Sampel yang digunakan adalah pegawai bagian Keuangan di 24 OPD Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Pengaruh, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan SIPD, Kualitas Laporan Keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah dalam otonomi daerah merupakan suatu hal yang kompleks dan membutuhkan kebijakan yang tepat. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah saat ini diharapkan mampu dilaksanakan secara transparansi dan akuntabel untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih (Pujanira & Taman, 2017).

Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi salah satu pemerintahan yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Langkah pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik yang bersumber dari pajak, retribusi dan lain-lain. Laporan keuangan daerah mencakup informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran, posisi keuangan, serta

arus kas daerah yang terjadi pada periode tertentu yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gabungan dari beberapa laporan keuangan organisasi perangkat daerah yang ada di daerah tersebut (Yulianda dkk., 2022). Setiap organisasi perangkat daerah wajib membuat dan menghasilkan laporan keuangannya sendiri termasuk organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. 20 Dinas Daerah
5. 5 Badan
6. 17 Kapanewon

Laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah harus menyajikan informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Secara garis besar, tujuan umum dari penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*) serta memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (Mardiasmo, 2004). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat beberapa syarat kualitas laporan keuangan pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Kualitas laporan keuangan dapat diartikan sebagai gambaran dari kondisi laporan keuangan yang memberikan informasi laporan keuangan yang dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pemakainya dalam pengambilan keputusan.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan SDM yang berkompeten. Menurut Watson Wyatt, indikator kompetensi sumber daya manusia terdiri dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap atau perilaku (Ruky, 2013). Suatu entitas wajib memiliki sumber daya manusia dalam menjalankan operasionalnya demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa sumber daya manusia yang memadai, entitas akan mengalami kesulitan dalam mencapai kinerjanya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu bentuk kompetensi SDM dapat dilihat dari ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK-RI, hal ini menunjukkan SDM sudah mahir dalam mengelola sebuah laporan keuangan. Penelitian (Yulianda dkk., 2022) menghubungkan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah dan menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Lebih lanjut pada penelitian (Irafah dkk., 2020) juga membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengendalian intern merupakan tindakan dan kegiatan dilakukan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk menciptakan keyakinan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui operasional yang efektif dan efisien (Mulyati dkk., 2023). Sistem pengendalian intern pemerintah dilakukan baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Pengendalian internal di lingkungan pemerintah diharapkan mampu mencegah ataupun mengidentifikasi adanya kesalahan dalam proses akuntansi dan pelaporan sehingga dapat memberikan

keyakinan terhadap keandalan dan kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem pengendalian internal dibentuk oleh lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern (Pemerintah Pusat, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh (Adah & Nasrullah, 2021) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maksyur, 2015) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sistem informasi dibutuhkan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan informasi untuk memantau dan menghimpun data dari setiap daerah agar dapat memberikan kemudahan yaitu pengolahan data dan menghasilkan informasi secara tepat, jelas dan terstruktur. Informasi ini berupa informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung pengintegrasian data khususnya terkait pelaporan keuangan. Menurut (Widayanti, 2019) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diukur menggunakan beberapa instrumen yaitu keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan atau output dan relevansi sistem. Penerapan SIPD

sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan data khususnya dalam data pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yulianda dkk., 2022), penerapan sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pujanira & Taman, 2017) yang membuktikan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh penilaian yaitu berupa opini dari Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) tiap tahunnya. Laporan Kuangan diperiksa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk opini audit. Terdapat empat opini audit yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Pada tahun 2023, Kabupaten Bantul berhasil memperoleh prestasi dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP ini merupakan prestasi atas kinerja antara OPD dan DPRD serta stkaholder lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Dengan perolehan opini WTP tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Faktor kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah

diasumsikan menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang membuktikan apakah ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian yang diambil adalah:

1. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul?

I.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang, batasan penelitian yang diambil antara lain:

1. Responden dari penelitian ini adalah pegawai dengan kriteria tertentu pada beberapa OPD di Pemerintah Kabupaten Bantul
2. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel independen yang terdiri dari kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem

Pengendalian Intern dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang diambil antara lain:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul.

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan tugas akhir, penelitian pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah daerah yang didapatkan selama menempuh pendidikan perkuliahan.
 - b. Dapat mengetahui dan memahami pengelolaan keuangan di pemerintah daerah

- c. Memperoleh relasi dan koneksi yang bermanfaat di kemudian hari

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul

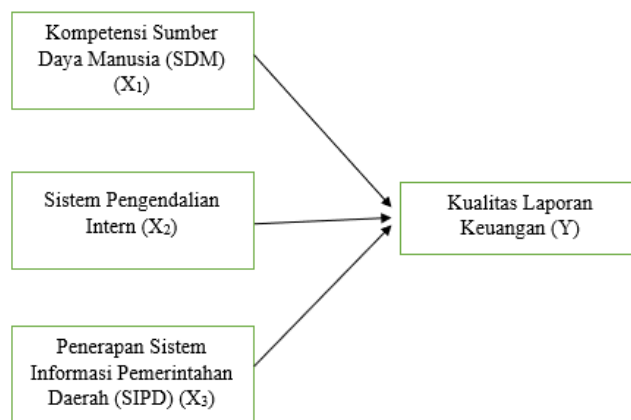
- a. Sebagai bahan masukan untuk evaluasi mengenai kompetensi SDM di Pemerintah Kabupaten Bantul
- b. Sebagai bahan masukan untuk evaluasi mengenai Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Bantul
- c. Sebagai bahan masukan untuk evaluasi mengenai penerapan SIPD di Pemerintah Kabupaten Bantul
- d. Sebagai bahan masukan untuk evaluasi mengenai kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul
- e. Dapat menjalin hubungan baik dengan universitas.

3. Bagi Universitas

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah sebagai referensi pustaka pada perpustakaan.
- b. Menjadi tambahan wawasan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi tugas akhir bagi penelitian selanjutnya.
- c. Dapat menjalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Bantul.

I.6 Kerangka Penelitian

Uraian dari kerangka penelitian yang diambil dapat dijelaskan dengan gambar berikut:



Gambar I. 1 Kerangka Penelitian

BAB II

GAMBARAN UMUM

II.1 Kondisi Umum Penulisan

Awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah dimulainya perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Setelah meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif. Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 saptar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul. Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya

diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgementie ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan:

- Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Selatan: Samudera Indonesia
- Timur: Kabupaten Gunung Kidul
- Barat: Kabupaten Kulon Progo

II.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.”

Misi:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

II.1.2 Semboyan Pemerintah Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki semboyan daerah yang dikenal dengan “PROJOTAMANSARI”. Berikut merupakan kepanjangan dan penjelasan makna dari “PROJOTAMANSARI”:

1. PRODUKTIF

dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

2. PROFESIONAL

dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing. Tolok ukur profesional ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

3. IJO ROYO-ROYO

dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang diterlantarkan sehingga baik musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

4. TERTIB

dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, perpedoman pada sistem

ketentuan hukum / perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

5. AMAN

dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintah dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi semacam ini perlu didukung demi terpeliharanya stabilitas daerah.

6. SEHAT

dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

7. ASRI

dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan, kesan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

II.2 Tinjauan Pustaka

II.2.1 Kompetensi SDM

Kompetensi adalah ciri dan kemampuan kerja yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan (Badan Kepegawaian Negara, 2013). Ketiga aspek ini

penting untuk menentukan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi tinggi mampu menyelesaikan tugas dengan efektif, efisien dan hemat (Adah & Nasrullah, 2021). Kompetensi sumber daya manusia merujuk pada kemampuan individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, didukung oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai (Maksyur, 2015). Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan karena dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan dapat diandalkan.

II.2.2 Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan serta seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pemerintah Pusat, 2008). Pengendalian intern adalah suatu langkah dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi dan memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (Armel, 2017). Pengendalian intern

terdiri dari kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai tujuan serta menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal dan menjamin kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku (Syifa Nurillah & Muid, 2014).

II.2.3 SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sebuah sistem yang mengelola informasi terkait pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang memiliki hubungan, sehingga memiliki manfaat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Kemendagri, 2019). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah dalam suatu sistem yang dikelola secara khusus. Penggunaan SIPD ditegaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Mulai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang untuk lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel telah mulai diterapkan oleh pemerintah daerah (Adietia, 2021).

II.2.4 Penerapan SIPD

Penerapan atau implementasi adalah tahap merealisasikan tujuan program, dimana penting untuk memperhatikan persiapan implementasi mencakup pemikiran dan perhitungan mendalam terhadap berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, serta mempertimbangkan hambatan atau peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut (Syahrudin, 2018). Penerapan SIPD merupakan wujud dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan daerah melalui sebuah sistem informasi. Pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoperasikan aplikasi berbentuk website Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Nasution & M.Si, 2021).

II.2.5 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gabungan dari beberapa laporan keuangan organisasi perangkat daerah dalam pemerintah daerah tersebut. Menurut Kerangka Konseptual PP No. 71 tahun 2010 paragraf 24, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Yulianda dkk., 2022). Laporan Keuangan

dianggap berkualitas apabila dapat menyajikan informasi laporan keuangan yang mudah dipahami dan mampu memenuhi kebutuhan penggunaanya dalam pengambilan keputusan. Pada PP No 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi empat syarat, yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

II.3 Keaslian Penelitian

Penelitian tugas akhir ini merupakan karya asli dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul” yang merupakan penelitian asli, bukan merupakan duplikat atau plagiat dari tugas akhir/skripsi/jurnal penelitian sebelumnya. Adapun penelitian tugas akhir ini disusun dengan merujuk penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut di bawah ini merupakan tabel yang dapat menunjukkan persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan:

Tabel II. 1 Keaslian Penelitian

N o	Nama Penulis	Tahun	Judul	Objek Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Devia Yulianda, Nasrul Kahfi Lubis, Iqlima Azhar	2022	Pengaruh Kompetensi Pengguna, Teknologi Informasi dan Implementasi SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa	Pemerintah Daerah Kota Langsa	Metode Kuantitatif	- Variabel Kompetensi SDM (X), Variabel Implementasi SIPD (X), dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) - Alat analisis menggunakan SPSS	Variabel Teknologi Informasi (X)	Kompetensi Pengguna, Teknologi Informasi dan Implementasi SIPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, Muhyarsyah	2020	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Sumatera Utara	Metode Deskriptif Kuantitatif	Variabel Kompetensi SDM (X), Variabel Penerapan SIPD (X), Variabel	Variabel Peran Internal Audit (X)	Kompetensi SDM dan Peran Internal Audit berpengaruh terhadap

			Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan			Kualitas Laporan Keuangan (Y) 2. Alat analisis menggunakan SPSS		kualitas laporan keuangan sedangkan Kesuksesan SIPD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Abdullah Taman	2017	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas	Pemerintah Provinsi DIY	Metode Kuantitatif	1. Variabel Kompetensi SDM (X) dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) 2. Alat analisis menggunakan SPSS	1. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X), Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)	Kompetensi SDM, penerapan SAP dan penerapan SIAKD berpengaruh positif terhadap kualitas LK.

			Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY					
4.	Shohabatussa'adah, Muhammad Nasrullah	2021	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan	Pemerintah Kota Pekalongan	Metode Kuantitatif	1. Variabel Kompetensi SDM (X), Variabel SPI (X) dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kompetensi SDM, pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap kualitas LK. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap LK.
5.	Noprial Valenra Maksyur	2015	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia,	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	Metode Kuantitatif	1. Variabel Kualitas SDM (X), Variabel Sistem	1. Variabel Komitmen Organisasi (X) dan Variabel	Kualitas SDM, Komitmen organisasi, Sistem

			Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)			Pengendalian Intern (X), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) 2. Alat analisis menggunakan SPSS	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X)	Pengendalian Intern dan pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas LK.
6.	Nurpala, Arrozi	2023	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem	Pemerintah Provinsi Jakarta	Metode Kuantitatif Deskriptif	1. Variabel Kompetensi SDM (X), Variabel SIPD (X), Variabel Sistem Pengendalian Intern (X) dan Variabel	1. Teknik pengambilan sampel yaitu sampel jenuh.	Kompetensi SDM, SIPD dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas LK.

			Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kualitas Laporan Keuangan (Y)		
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

Sumber: Data Diolah (2024)

II.4 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini terdiri dari:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diartikan sebagai kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai sehingga semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sumber Daya Manusia harus memiliki kompetensi yang baik dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak mengalami kekeliruan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait adanya hubungan pengaruh antara variabel kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Yulianda dkk (2022), Taman (2017), Nurpala dan Arrozi (2023), dan Irafah dkk (2020), maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa variabel kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kesimpulan tersebut dapat diartikan bahwa dengan kompetensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan laporan keuangan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pula.

Berdasarkan pengertian dan penelitian terdahulu yang terdapat di atas, maka didapatkan hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh positif dari kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul.

2. Sistem Pengendalian Intern merupakan sistem pengendalian yang dilakukan oleh manajemen dan pegawai dalam suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan *fraud*. Semakin meningkat suatu pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai suatu organisasi maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan sistem pengendalian intern, laporan keuangan yang dihasilkan akan terhindar dari risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan yang dapat menimbulkan *fraud*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait adanya hubungan pengaruh antara variabel Sistem Pengendalian Intern dan kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Adah dan Nasrullah (2021), Maksyur (2015), serta Nurpala dan Arrozi (2023) maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kesimpulan tersebut dapat diartikan bahwa semakin baik sistem

pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat juga.

Berdasarkan pengertian dan penelitian terdahulu yang terdapat di atas, maka didapatkan hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh positif dari Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat diartikan sebagai penerapan sistem yang mengelola informasi pembangunan, keuangan dan pemerintahan daerah lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Semakin SIPD ini diterapkan maka semakin memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Terdapat penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap hubungan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Yulianda dkk (2022) serta Nurpala dan Arrozi (2023). Berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan pengertian dan penelitian terdahulu yang terdapat di atas, maka didapatkan hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh positif dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan gambaran jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga dengan desain yang baik peneliti atau orang lain yang berkepentingan memiliki gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel (Sukardi, 2018). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2013), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan. Penggunaan desain metode statistik kuantitatif ini adalah untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel independen (yang mempengaruhi) dan dependen (yang dipengaruhi) dan memberikan penjelasan dengan angka.

III.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Data primer diperoleh

dari kuisisioner yang disebarakan untuk diisi oleh responden. Pada penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu 96 pegawai subbagian Program dan Keuangan di 17 OPD Kabupaten Bantul dengan menyebarkan kuisisioner penelitian.

III.3 Teknik Pengumpulan Data

Data primer merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada responden yang merupakan sampel penelitian di Pemerintah Kabupaten Bantul secara langsung. Menurut (Sugiyono, 2013) kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Peneliti membagikan kuisisioner yang berisi beberapa pertanyaan yang terkait dengan topik.

III.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah 17 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang akan dilakukan penelitian (Hafni Sahir, 2021). Pemilihan sampel pada penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2013), teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan teknik ini

cocok dengan penelitian yang memerlukan kriteria-kriteria tertentu agar sample yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini yaitu 96 pegawai di bidang Program dan Keuangan yang tersebar di 17 OPD Kabupaten Bantul.

III.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti, spesifikasi kegiatan atau suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 2013). Menurut (Ulfa, 2021) Definisi operasional variabel dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindari perbedaan interpretasi dan juga membatasi ruang lingkup variabel. Dalam penelitian ini, terdapat variabel independen atau variabel bebas dan juga variabel dependen atau variabel terikat. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing variabel:

III.5.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel ini menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilambangkan sebagai (X_1), Sistem Pengendalian Intern yang dilambangkan sebagai (X_2) dan

penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dilambangkan sebagai (X_3).

III.5.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah kualitas laporan keuangan yang dilambangkan sebagai (Y).

Berikut merupakan rincian dari operasional variabel yang terdapat dalam penelitian:

Tabel III. 1 Rincian Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Landasan Teori
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X_1)	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diartikan sebagai kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai.	Indikator pertanyaan yang digunakan terdiri dari 3 instrumen: 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap	Likert	Watson Wyatt dalam Ruky (2013)
Sistem Pengendalian Intern (X_2)	Sistem Pengendalian Intern merupakan sistem	Indikator pertanyaan yang digunakan terdiri dari 5 instrumen:	Likert	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

	pengendalian yang dilakukan oleh manajemen dan pegawai dalam suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan <i>fraud</i> .	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian intern		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (X ₃)	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat diartikan sebagai penerapan sistem yang mengelola informasi pembangunan, keuangan dan pemerintahan daerah lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	Indikator pertanyaan yang digunakan terdiri dari 5 instrumen: 1. Keamanan data 2. Kecepatan dan ketepatan waktu 3. Ketelitian 4. Variasi laporan atau output 5. Relevansi sistem	Likert	Widayanti (2019)
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kualitas laporan keuangan dapat diartikan sebagai gambaran dari kondisi laporan keuangan yang memberikan informasi laporan keuangan yang dapat dipahami	Indikator pertanyaan yang digunakan terdiri dari: 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Likert	Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

	dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pemakainya dalam pengambilan keputusan.			
--	---	--	--	--

Sumber: Data Diolah (2024)

III.6 Instrumen Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2013), instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur variabel penelitian. Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan sebagai alat ukur adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

III.6.1 Uji Validitas

Uji Validitas merupakan uji coba pertanyaan penelitian dengan tujuan untuk melihat sejauh mana responden mengerti dengan pertanyaan yang diajukan (Hafni Sahir, 2021). Penelitian ini menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* sebagai standar pengujiannya yang meliputi:

1. Dapat dikatakan data valid apabila signifikansi $< 0,05$.
2. Dapat dikatakan data tidak valid apabila signifikansi $> 0,05$.
3. Dapat dikatakan data valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel.
4. Dapat dikatakan data tidak valid apabila nilai r hitung $< r$ tabel

III.6.2 Uji Realibilitas

Uji Realibilitas merupakan alat uji coba yang digunakan untuk mengukur kekonsistenan jawaban responden. Penelitian ini menggunakan standar kriteria pengujiannya dengan *Cronbach's Alpha* yang menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skema skala variabel yang ada. Standar kriteria pengujian dengan *Cronbach's Alpha* meliputi:

1. Dapat dikatakan data reliabel apabila memberikan nilai $> 0,7$.
2. Dapat dikatakan data tidak reliabel apabila memberikan nilai $< 0,7$.

III.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang diolah dengan teknik tertentu agar menghasilkan informasi yang mudah dipahami (Sugiyono, 2013). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, melakukan pengujian kualitas data, melakukan pengujian klasik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda menggunakan

program SPSS. Berikut merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

III.7.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif sebelum melakukan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk dapat menguji apakah data yang akan digunakan untuk uji hipotesis yaitu data dari variabel dependen dan independen yang digunakan telah berdistribusi secara normal atau kah tidak.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk dapat menguji apakah model regresi memiliki keragaman error yang sama atau tidak. Asumsi keragaman error yang sama ini disebut dengan homoskedastisitas, sedangkan heteroskedastisitas yaitu terjadi jika keragaman nilai errornya tidak konstan atau berbeda.

III.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Hafni Sahir, 2021), analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain.

Analisis regresi linier berganda cocok digunakan dalam penelitian ini karena terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Rumus persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Berikut merupakan keterangan dari rumus di atas:

Y : Variabel Dependen (Kualitas Laporan Keuangan)

a : Koefisien konstanta

b_{1-2} : Koefisien Regresi

X_1 : Variabel Independen₁ (Kompetensi SDM)

X_2 : Variabel Independen₂ (Sistem Pengendalian Intern)

X_3 : Variabel Independen₃ (Penerapan SIPD)

e : Standar Error

III.7.3 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang diusulkan dapat diterima atau ditolak. Uji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Uji Statistik T. Uji statistik T memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam penelitian.

III.7.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji seberapa besar kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

IV.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian tentang pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian intern dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah kabupaten Bantul ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Sampel yang digunakan adalah 96 pegawai bidang Program dan Keuangan di 17 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Instrumen teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner dengan item pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator pertanyaan yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sudiarianti dkk., 2015) dan (Rohmadani, 2023).

Sejumlah 96 eksemplar kuisioner telah disebarakan ke 96 pegawai bidang program dan keuangan di 17 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun daftar 17 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul yang dijadikan subjek penelitian adalah:

Tabel IV. 1 Daftar OPD Kab. Bantul

No	Organisasi Perangkat Daerah
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2.	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika

5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.	Dinas Kebudayaan Daerah
7.	Dinas Kesehatan
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9.	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Dinas Pariwisata
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
13.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15.	Dinas Sosial
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan
17.	Satpol PP

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2024)

Kuisisioner yang telah disebarkan kepada 96 pegawai telah diisi dan kembali dengan lengkap sehingga data kuisisioner yang sudah terkumpul dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian intern dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul. Berikut terdapat gambaran umum karakteristik responden penelitian yang telah mengisi kuisisioner dapat dilihat berdasarkan:

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan data kuisisioner yang sudah dibagikan kepada 96 pegawai bidang Program dan Keuangan di 17 OPD Kabupaten Bantul, hasil olah data dapat dilihat pada tabel IV.2 yang menunjukkan bahwa dari total responden, 36% responden adalah laki-laki dan 64% sisanya adalah perempuan.

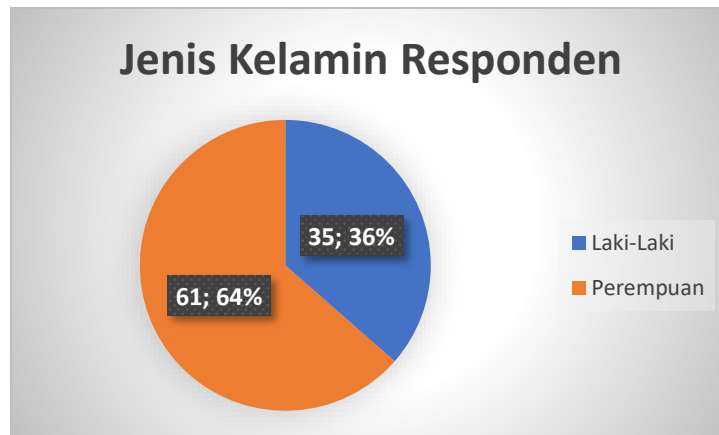
Tabel IV. 2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	35	36%
Perempuan	61	64%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer, Diolah (2024)

Apabila disajikan dalam bentuk *pie diagram*, maka dapat dilihat bahwa warna biru mewakili responden yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 35 orang atau 36% dan warna oranye mewakili responden yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 61 orang atau 64%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan.

Gambar IV. 1 *Pie Diagram* Jenis Kelamin Responden



Sumber: Data Primer, Diolah (2024)

b. Usia

Usia responden yang mengisi kuisioner ini dibagi menjadi 4 kelompok usia yaitu usia 25-34 tahun, 35-44 tahun, 45-54 tahun dan 55-64 tahun. Pada tabel IV.3 menunjukkan bahwa presentase tertinggi usia responden yaitu pada usia 25-34 tahun sebesar 36%. Selanjutnya terdapat presentase tertinggi kedua yaitu pada kelompok usia 35-44 tahun dan 45-54 tahun dengan presentase masing-masing sebesar 28%. Adapun presentase terendah yaitu kelompok usia 55-64 tahun sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa usia responden mayoritas adalah usia 25-34 tahun.

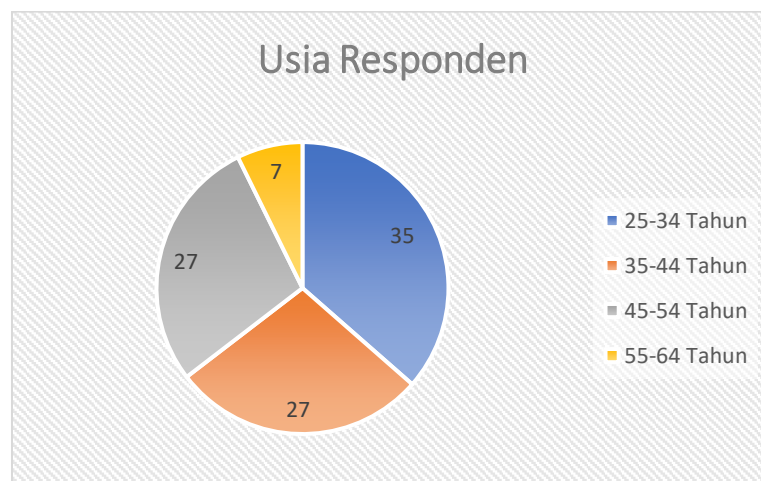
Tabel IV. 3 Usia Responden

Kelompok Usia	Frekuensi	Presentase
25-34 Tahun	35	36%
35-44 Tahun	27	28%
45-54 Tahun	27	28%
55-64 Tahun	7	7%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer, Diolah (2024)

Agar lebih jelas, telah disajikan Gambar IV.2 yang memuat usia responden penelitian dalam bentuk *pie diagram*. Warna biru mewakili kelompok usia 25-34 tahun dengan jumlah responden sebanyak 35 orang, lalu warna cokelat mewakili kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 27 orang, warna abu-abu mewakili kelompok usia 45-54 tahun sebanyak 27 orang dan warna kuning mewakili kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 7 orang.

Gambar IV. 2 *Pie Diagram* Usia Responden



Sumber: Data Primer, Diolah (2024)

c. Pendidikan Terakhir

Berdasarkan hasil olah data terkait pendidikan terakhir responden penelitian, dapat dilihat pada tabel IV.4 menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden adalah S1 sebesar 47%. Adapun tabel pendidikan terakhir responden penelitian ini sebagai berikut:

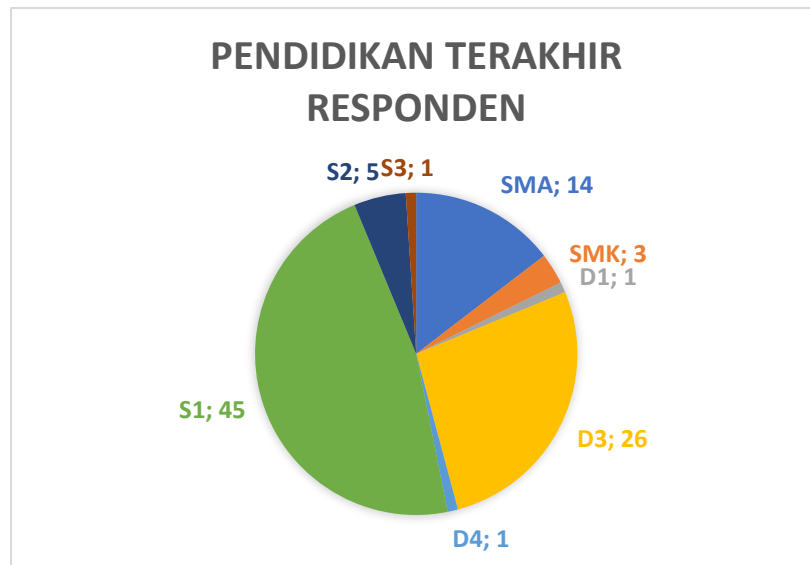
Tabel IV. 4 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
SMA	14	15%
SMK	3	3%
D1	1	1%
D3	26	27%
D4	1	1%
S1	45	47%
S2	5	5%
S3	1	1%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer, Diolah (2024)

Gambar IV.3 telah disajikan *pie diagram* yang menunjukkan pendidikan terakhir responden penelitian. Warna hijau mewakili pendidikan S1 sejumlah 45 orang, warna kuning mewakili pendidikan D3 sejumlah 26 orang, warna biru muda mewakili pendidikan SMA sejumlah 14 orang, warna biru tua mewakili pendidikan S2 sejumlah 5 orang, warna orange mewakili pendidikan SMK sebanyak 3 orang, warna abu-abu mewakili pendidikan D1 sejumlah 1 orang, warna biru langit mewakili pendidikan D4 sebanyak 1 orang, dan warna coklat mewakili pendidikan S3 sebanyak 1 orang.

Gambar IV. 3 Pie Diagram Pendidikan Terakhir Responden



Sumber: Data Primer, Diolah (2024)

d. Jurusan Responden

Berdasarkan olah data primer terkait jurusan responden penelitian, dapat dilihat pada tabel IV.5 di bawah bahwa mayoritas jurusan yang diambil oleh responden saat melakukan pendidikan terakhir adalah jurusan Akuntansi dengan presentase 28% atau sebanyak 27 orang dan sisanya mengambil jurusan seperti Manajemen, Ilmu Komputer dan lain-lain.

Tabel IV. 5 Jurusan Responden

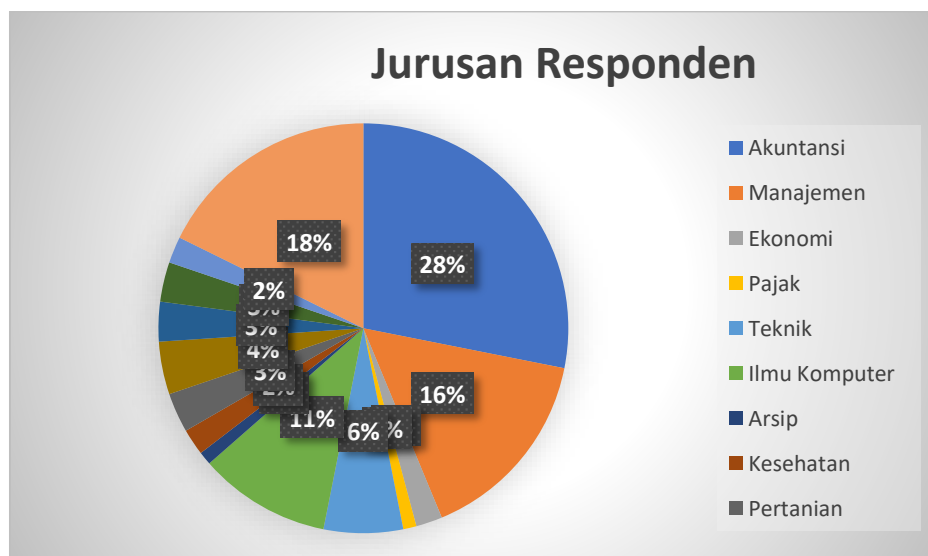
Jurusan	Frekuensi	Presentase
Akuntansi	27	28%
Manajemen	15	16%
Ekonomi	2	2%
Pajak	1	1%
Teknik	6	6%
Ilmu Komputer	10	10%
Arsip	1	1%
Kesehatan	2	2%

Pertanian	3	3%
Peternakan	4	4%
IPS	3	3%
IPA	3	3%
Bahasa	2	2%
Tidak Menjawab	17	18%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer, Diolah (2024)

Apabila disajikan dengan bentuk *pie diagram*, dapat dilihat bahwa warna biru tua mendominasi jurusan responden yaitu Akuntansi sedangkan warna oranye muda merupakan gambaran dari responden yang memilih tidak menjawab jurusannya.

Gambar IV. 4 *Pie Diagram* Jurusan Responden



Sumber: Data Primer, Diolah (2024)

IV.1.1 Analisis Data Hasil Penelitian

Analisis data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh secara lengkap. Sebelum melakukan penyebaran kuisioner ke responden asli, peneliti melakukan uji coba dengan melakukan penyebaran

kuisisioner kepada mahasiswa akuntansi menggunakan *google form*. Kemudian, dilakukan pengujian validitas dan realibilitas untuk mengetahui apakah kuisisioner yang diberikan sudah valid dan realibilitas untuk disebar langsung ke responden yang asli. Setelah kuisisioner telah disebarkan langsung ke responden asli yaitu 96 pegawai bidang Program dan Keuangan, dilakukan uji validitas dan normalitas kembali. Kemudian, dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan dalam analisis regresi linier berganda. Untuk mengetahui pengaruh antar koefisien dan juga menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, perlu dilakukan uji asumsi klasik berupa Uji T untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan uji hipotesis dengan metode regresi linier berganda dan uji koefisien determinasi.

IV.1.2 Statistik Deskriptif

Tabel IV. 6 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi SDM	96	11	30	22.23	3.435
Sistem Pengendalian Intern	96	30	50	41.36	4.297
Penerapan SIPD	96	32	70	55.40	6.615
Kualitas Laporan Keuangan	96	24	40	33.46	3.653
Valid N (listwise)	96				

Sumber: SPSS, Diolah (2024)

Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif yang telah diolah di atas, dapat diketahui bahwa kuisisioner telah disebarkan kepada 96 responden yang merupakan pegawai di bidang Program dan Keuangan di 17 OPD Kabupaten Bantul. Pada tabel IV.6 diketahui bahwa terdapat 96 responden yang memberikan data mengenai berbagai variabel penelitian. Kompetensi SDM memiliki nilai minimum 11 dan maksimum 30 dengan rata-rata (mean) 22.23 dan deviasi standar 3.435. Sistem Pengendalian Intern menunjukkan nilai minimum 30 dan maksimum 50, dengan rata-rata 41.36 serta deviasi standar 4.297. Penerapan SIPD mencatat nilai minimum 32 dan maksimum 70 dengan rata-rata 55.40 dan deviasi standar 6.615. Terakhir, Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai minimum 24 dan maksimum 40, dengan rata-rata 33.46 dan deviasi standar 3.653. Semua data ini valid dengan jumlah responden sebanyak 96 orang.

IV.1.3 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dalam sebuah penelitian penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian valid dan reliabel.

IV.1.4 Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji yang menentukan sejauh mana alat ukur memperoleh data yang valid atau sah dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* sebagai standar pengujiannya yang meliputi:

1. Dapat dikatakan data valid apabila signifikansi $< 0,05$.
2. Dapat dikatakan data tidak valid apabila signifikansi $> 0,05$.
3. Dapat dikatakan data valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel.
4. Dapat dikatakan data tidak valid apabila nilai r hitung $< r$ tabel

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ dan juga nilai r hitung $> r$ tabel pada seluruh indikator dan variabel. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diartikan bahwa setiap indikator pertanyaan dalam penelitian pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Bantul adalah valid. Berikut merupakan tabel hasil pengujian validitas dari kuisioner yang telah disebar dan diolah oleh peneliti:

Tabel IV. 7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Hasil		Standar		Keterangan
		Pearson Corelasi on	Signifika si	Pearson Corelasi on	Signifika si	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	X1.1	,842**	0,000	$> 0,263$	$< 0,05$	Valid
	X1.2	,875**	0,000			
	X1.3	,872**	0,000			
	X1.4	,824**	0,000			
	X1.5	,717**	0,000			
	X1.6	,708**	0,000			
Sistem Pengendalian Intern	X2.1	,733**	0,000			Valid
	X2.2	,721**	0,000			
	X2.3	,807**	0,000			
	X2.4	,861**	0,000			

	X2.5	,815**	0,000			
	X2.6	,709**	0,000			
	X2.7	,843**	0,000			
	X2.8	,842**	0,000			
	X2.9	,798**	0,000			
	X2.10	,834**	0,000			
Penerapan SIPD	X3.1	,597**	0,000			Valid
	X3.2	,547**	0,000			
	X3.3	,829**	0,000			
	X3.4	,822**	0,000			
	X3.5	,862**	0,000			
	X3.6	,821**	0,000			
	X3.7	,795**	0,000			
	X3.8	,811**	0,000			
	X3.9	,777**	0,000			
	X3.10	,816**	0,000			
	X3.11	,740**	0,000			
	X3.12	,825**	0,000			
	X3.13	,870**	0,000			
	X3.14	,865**	0,000			
Kualitas Laporan Keuangan	Y1	,789**	0,000			Valid
	Y2	,766**	0,000			
	Y3	,812**	0,000			
	Y4	,866**	0,000			
	Y5	,798**	0,000			
	Y6	,849**	0,000			
	Y7	,884**	0,000			
	Y8	,855**	0,000			

Sumber: SPSS, Diolah (2024)

Dari tabel IV.7 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kuisisioner yang diberikan kepada responden menunjukkan nilai yang valid dengan hasil uji siginifikasi <0,05 untuk seluruh variabel.

IV.1.5 Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas dan data dikatakan valid, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reabilitas untuk menilai

konsistensi dari jawaban kuisioner dengan melakukan uji reliabilitas. Penelitian ini menggunakan standar kriteria pengujiannya dengan *Cronbach's Alpha* yang menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skema skala variabel yang ada. Standar kriteria pengujian dengan *Cronbach's Alpha* meliputi:

1. Dapat dikatakan data reliabel apabila memberikan nilai $> 0,7$.
2. Dapat dikatakan data tidak reliabel apabila memberikan nilai $< 0,7$.

Adapun hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

Tabel IV. 8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil Cronbach Alpha	Standar Cronbach Alpha	Keterangan
Kompetensi SDM	0,891	$>0,7$	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,935		Reliabel
Penerapan SIPD	0,952		Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,932		Reliabel

Sumber: SPSS, Diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jawaban kuisioner yang telah diisi oleh responden adalah reliabel karena telah melebihi standar *Cronbach Alpha* yaitu $>0,7$.

IV.1.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi beberapa asumsi dasar yang diperlukan agar hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan secara akurat dan valid. Asumsi-asumsi tersebut meliputi uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi data residual dari model regresi mendekati distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Test of Normality Kolmogrov-Smirnov*. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 9 Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Hasil
Jumlah Sampel	96
Exact Sig (2-tailed)	0,90

Sumber: SPSS, Diolah (2024)

Pada tabel IV.9 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas adalah 0,90 yang diolah memiliki nilai *Exact Sig (2-tailed)* $> 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser dengan standar tidak terdapat gejala heterokedastisitas apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil uji glejser dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel IV. 10 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Hasil Signifikasi	Standar Siginifikasi	Keterangan
Kompetensi SDM	0,757	>0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Sistem Pengendalian Intern	0,999		Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Penerapan SIPD	0,932		Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: SPSS, Diolah (2024)

Pada tabel IV.10 di atas menunjukkan hasil uji heterokedastisitas dengan hasil signifikasi ketiga variabel adalah >0,05 yang menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terbebas dari gejala heterokedastisitas dan layak digunakan dalam analisis linier berganda.

IV.1.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengolahan data analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Koefisien yang Tidak Standar		Standar Koefisien	t	Signifikasi
		B	Standar Error	Beta		
1.	Konstanta	2,990	2,131	0,000	1,403	0,164
	Kompetensi SDM (X1)	0,125	0,069	0,117	1,794	0,076
	Sistem Pengendalian Intern (X2)	0,592	0,071	0,696	8,387	0,000
	Penerapan SIPD (X3)	0,058	0,045	0,105	1,291	0,200
Ket: Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan (Y)						

Sumber: SPSS, Diolah (2024)

Mengacu hasil olah data pada tabel IV.11, dapat diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 2,990 + 0,125 X_1 + 0,592 X_2 + 0,058 X_3 + e$$

Berikut merupakan keterangan dari model rumus di atas:

Y : Kualitas Laporan Keuangan

a : Koefisien Konstanta

b_{1-3} : Koefisien Regresi

X_1 : Kompetensi SDM

X_2 : Sistem Pengendalian Intern

X_3 : Penerapan SIPD

e : Standar Error

Berdasarkan model persamaan regresi linier berganda di atas, hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien konstanta (*constant*) yang diperoleh adalah 2,990. Hal tersebut menandakan bahwa variabel independen pada model ini yang terdiri dari kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan SIPD adalah nol, maka pengaruh terhadap variabel terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan adalah sebesar 2,990.
- b. Koefisien regresi pada variabel X_1 yaitu kompetensi SDM nilainya adalah 0,125. Hal tersebut berarti apabila terjadi kenaikan sebesar 1% pada variabel ini, maka akan meningkatkan nilai kualitas laporan keuangan sebesar 0,125.
- c. Koefisien regresi pada variabel X_2 yaitu Sistem Pengendalian Intern nilainya adalah 0,592. Hal tersebut berarti apabila terjadi kenaikan sebesar

1% pada variabel ini, maka akan meningkatkan nilai kualitas laporan keuangan sebesar 0,592.

- d. Koefisien regresi pada variabel X3 yaitu penerapan SIPD nilainya adalah 0,058. Hal tersebut berarti apabila terjadi kenaikan sebesar 1% pada variabel ini, maka akan meningkatkan nilai kualitas laporan keuangan sebesar 0,058.

IV.1.8 Uji Kelayakan Model

Untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan dapat diterima dan digunakan dengan baik, dilakukan uji kelayakan model. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana model mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena yang diamati berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menguji kelayakan model pada penelitian ini menggunakan Uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen kompetensi SDM (X1), sistem pengendalian intern (X2) dan penerapan SIPD (X3) secara parsial terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y). Standar yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian T adalah jika nilai T hitung $> T$ tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$. Berikut merupakan perhitungan T tabel:

$$T \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$T \text{ tabel} = t (0,005 ; 96-3-1)$$

$$T \text{ tabel} = t (0,005 ; 92)$$

T tabel = 2,693

Keterangan:

α = Nilai Alpha (tingkat kepercayaan 99%, $\alpha = 0,01$)

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel

Hasil pengujian T dalam penelitian ini menggunakan program SPSS

25 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 12 Hasil Uji T

Variabel Independen	Hasil		Standar	
	t	Signifikasi	t	Signifikasi
Konstanta	1,403	0,164	>2,639	<0,05
Kompetensi SDM (X1)	1,794	0,076		
Sistem Pengendalian Intern (X2)	8,387	0,000		
Penerapan SIPD (X3)	1,291	0,200		
Ket: Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan (Y)				

Sumber: SPPS, Diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan pertama yaitu tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel independen kompetensi SDM (X1) terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y). Hal tersebut terlihat dari hasil yang tidak memenuhi standar uji T sehingga H1 tidak didukung. Rincian hasil analisisnya adalah sebagai berikut:

H1 = Diketahui signifikansi untuk pengaruh positif X1 terhadap Y adalah sebesar 0,076 atau $> 0,05$. Nilai t hitung adalah 1,794 atau $< 2,639$.

Dapat diambil kesimpulan bahwa H1 tidak didukung karena tidak memenuhi standar Uji T.

Kesimpulan kedua yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel independen sistem pengendalian intern (X2) terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y). Hal tersebut terlihat dari hasil yang memenuhi standar uji T sehingga H2 didukung. Rincian hasil analisisnya adalah sebagai berikut:

H2 = Diketahui signifikansi untuk pengaruh positif X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 atau $< 0,05$. Nilai t hitung adalah 8,387 atau $> 2,639$. Dapat diambil kesimpulan bahwa H2 didukung yang berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan dari X2 terhadap Y karena memenuhi standar Uji T.

Kesimpulan ketiga yaitu tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel independen penerapan SIPD (X3) terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y). Hal tersebut terlihat dari hasil yang tidak memenuhi standar uji T sehingga H3 tidak didukung. Rincian hasil analisisnya adalah sebagai berikut:

H3 = Diketahui signifikansi untuk pengaruh positif X3 terhadap Y adalah sebesar 0,200 atau $> 0,05$. Nilai t hitung adalah 1,291 atau $< 2,639$. Dapat diambil kesimpulan bahwa H3 tidak didukung karena tidak memenuhi standar Uji T.

IV.1.9 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel IV. 13 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	R Square yang disesuaikan	Kesalahan Estimasi
1	0,834	0,696	0,686	2,046
Ket. Prediktor: (Konstanta), Penerapan SIPD, Kompetensi SD, Sistem Pengendalian Intern				

Sumber: SPSS, Diolah (2024)

Pada Tabel IV.13 menunjukkan bahwa nilai R yang disesuaikan adalah 0,686. Nilai tersebut mengartikan bahwa kemampuan variabel sistem pengendalian intern (X2) berpengaruh secara parsial terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 68% sementara sisanya ($100\% - 68\% = 32\%$) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

IV.2 Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini fokus utamanya adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian intern dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul. Kuisisioner telah disebarakan kepada 96 pegawai dengan kriteria tertentu. Berdasarkan data yang telah diolah, diketahui bahwa kompetensi SDM (X1) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan (Y), sedangkan sistem pengendalian intern (X2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y), adapun penerapan SIPD (X3) juga tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Berikut merupakan pokok bahasan dalam penelitian ini:

a. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dari kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul. Setelah dilakukan pengujian data, diketahui bahwa hipotesis tersebut tidak terbukti. Hasil uji T menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak memberikan pengaruh secara signifikan sesuai standar ketentuan dengan nilai signifikasi sebesar 0,076 atau $> 0,05$ dan nilai t hitung 1,794 atau $< 2,639$ dari r tabel. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh (Yuliani & Agustini, 2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan data kuisioner yang diperoleh dalam penelitian, hanya 27 dari 96 responden yang berlatar pendidikan akuntansi baik dari latar belakang pendidikan SMK, D3, D4, S1 maupun S2 dengan presentase 28%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia pada bidang program dan keuangan pemerintah Kabupaten Bantul masih diisi oleh beberapa pegawai dengan latar pendidikan selain

Akuntansi. Sumber daya manusia yang berkompeten dengan jurusan pendidikan sesuai bidang yang diambil tentunya dibutuhkan karena memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

Pada (Yuliani & Agustini, 2016) dijelaskan bahwa apabila kompetensi sumber daya manusia dikerjakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah juga akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sejenis yang dilakukan oleh (Yulianda dkk., 2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi pengguna berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa H1 tidak terbukti.

b. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul

Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dari sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul. Setelah dilakukan pengujian data, diketahui bahwa hipotesis tersebut terbukti. Hasil uji T menunjukkan sistem pengendalian intern memberikan pengaruh secara signifikan sesuai standar ketentuan dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dan t hitung adalah 8,387 atau $> 2,639$.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurpala & Arrozi, 2023) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitiannya juga dikatakan bahwa semakin baik sebuah sistem pengendalian intern maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal tersebut tentunya didukung oleh adanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring secara rutin yang dilakukan oleh pegawai di pemerintahan. Dari kesimpulan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa H2 didukung.

- c. Pengaruh Penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Jakarta.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dari penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul. Setelah dilakukan pengujian data, diketahui bahwa hipotesis tersebut tidak terbukti. Hasil uji T menunjukkan bahwa penerapan SIPD tidak memberikan pengaruh secara signifikan sesuai standar ketentuan dengan nilai signifikansi sebesar 0,200 atau $> 0,05$ dan nilai t hitung 1,291 atau $< 2,639$ dari r tabel. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh (Irafah dkk, 2020) yang menyatakan penerapan sistem informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemerintah meluncurkan SIPD tepat pada tahun 2019 sebagai pengganti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (Hendra & Marja Sinurat, 2023). SIPD ini diharapkan dapat digunakan oleh tiap daerah dalam pengelolaan sistem informasi yang menghasilkan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nasution & M.Si, 2021) dan (Vitriana dkk., 2022), penerapan SIPD di beberapa daerah masih belum efektif. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti komunikasi yang berjalan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum maksimal, adaptasi penggunaan sistem yang lama ke sistem yang baru membutuhkan waktu yang lama, serta sarana dan pra sarana yang belum mampu mengimbangi perkembangan zaman saat ini. Beberapa faktor di atas menjadi penyebab mengapa penerapan SIPD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurpala & Arrozi, 2023) yang mengemukakan hasil bahwa SIPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa H3 tidak terbukti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul.
- b. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul.
- c. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)) tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka dihasilkan saran-saran yang dapat digunakan antara lain:

V.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul

- a. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas laporannya.
- b. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan mampu menempatkan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan jurusan yang dimiliki oleh setiap pegawai.

- c. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan mampu mengadakan pelatihan terhadap pegawai-pegawainya untuk meningkatkan kemampuan pegawainya.

V.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian yang lain yang dianggap berpengaruh terhadap variabel Y seperti standar akuntansi pemerintah, komitmen organisasi, regulasi dan kebijakan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan hasil penelitian terkait pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Diharapkan adanya replika penelitian menggunakan variabel lain yang sejalan dengan judul penelitian ini sehingga dapat diketahui penjelasan yang lebih detail atas sebuah interaksi antar variabel penelitian.

V.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yaitu objek penelitian hanya satu yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul.

LAMPIRAN



KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Kepada,

Bapak/Ibu/Saudara/i Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Di tempat

Dengan hormat,

Saya Azzura Salsabila mahasiswa D4 Akuntansi Sektor Publik angkatan 2020 sedang melakukan penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari Universitas Gadjah Mada. Sehubungan dengan hal tersebut, saya selaku penulis mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktunya mengisi

kuisisioner yang terlampir. Kegiatan penelitian ini ditujukan untuk kepentingan ilmiah dan daftar pernyataan yang terlampir dalam angket hanya digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data.

A. Identitas Responden

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Instansi :

Jabatan :

B. Petunjuk Teknis Pengisian

Berilah tanda (v) pada kolom jawaban yang dianggap paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memilih satu dari 5 skala berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

C. Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dapat diartikan sebagai gambaran dari kondisi laporan keuangan yang memberikan informasi laporan keuangan yang dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh penggunaanya dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PERNYATAAN TENTANG KUALITAS LAPORAN KEUANGAN						
No.	Pernyataan	Alternatif Pernyataan				
Relevan		SS	S	N	TS	STS
1.	Laporan keuangan yang saya susun sesuai dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
2.	Laporan keuangan yang saya susun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (<i>feedback value</i>)					
Andal						
3.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.					
4.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
Dapat Dibandingkan						
5.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
6.	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.					
Dapat Dipahami						
7.	Laporan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.					
8.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					

Sumber: Ni Made Sudiarianti (2015)

D. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diartikan sebagai kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai.

DAFTAR PERNYATAAN TENTANG KOMPETENSI SDM						
No.	Pernyataan	Alternatif Pernyataan				
Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memahami PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik.					
2.	Saya sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng-Upgdrade pengetahuan saya dibidang akuntansi.					
Keahlian (<i>Skill</i>)						
3.	Saya mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP.					
4.	Saya selalu mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan.					
Perilaku (<i>Attitude</i>)						
5.	Saya selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan.					
6.	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan.					

Sumber: Ni Made Sudiarianti (2015)

E. Variabel Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan sistem pengendalian yang dilakukan oleh manajemen dan pegawai dalam suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan *fraud*.

DAFTAR PERNYATAAN TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN						
No.	Pernyataan	Alternatif Pernyataan				
Lingkungan Pengendalian		SS	S	N	TS	STS
1.	Pimpinan SKPD selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern.					
2.	SKPD telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.					
Penilaian Risiko						
3.	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi					

4.	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.					
Kegiatan Pengendalian						
5.	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada SKPD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas.					
6.	Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi.					
Informasi dan Komunikasi						
7.	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif.					
8.	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya.					
Pemantauan						
9.	SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/revisi maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, SKPD melakukan perbaikan pengendalian intern.					
10.	Pimpinan selalu merevisi dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.					

Sumber: Ni Made Sudiarianti (2015)

F. Variabel Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat diartikan sebagai penerapan sistem yang mengelola informasi pembangunan, keuangan dan pemerintahan daerah lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

DAFTAR PERNYATAAN TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)						
No.	Pernyataan	Alternatif Pernyataan				
Keamanan Data		SS	S	N	TS	STS
1.	Pada Instansi/Lembaga tempat saya bekerja menerapkan sistem keamanan data password (kata sandi) untuk mengakses sistem informasi pemerintahan daerah.					
2.	Instansi/Lembaga tempat saya bekerja menerapkan keamanan data dengan adanya menu peringatan apabila terjadinya kerusakan pada sistem (seperti peringatan error).					

Kecepatan dan Ketepatan Waktu Akses						
3.	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada Instansi/Lembaga tempat saya bekerja mempercepat dalam pengimputan data.					
4.	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada Instansi/Lembaga tempat saya bekerja dapat mempercepat pencarian data yang diperlukan.					
5.	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada Instansi/Lembaga tempat saya bekerja mempercepat proses dan olah data menjadi laporan.					
6.	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada Instansi/Lembaga tempat saya bekerja mempercepat proses pencetakan/penyajian data yang sewaktu - waktu diperlukan.					
Ketelitian						
7.	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada Instansi/Lembaga tempat saya bekerja terdapat ketelitian dalam proses perhitungan angka.					
8.	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada Instansi/Lembaga tempat saya bekerja terdapat ketelitian dalam proses penyajian data.					
9.	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada Instansi/Lembaga tempat saya bekerja terdapat ketelitian dalam proses analisis data.					
Variasi Output						
10.	Instansi/Lembaga tempat saya bekerja menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 (Neraca, LRA, LAK dan CALK).					
Relevansi Sistem						
11.	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada Instansi/Lembaga tempat saya bekerja terdapat relevansi/kesesuaian sistem dalam penyajian data.					
12.	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada Instansi/Lembaga tempat saya bekerja terdapat relevansi/kesesuaian sistem dalam hal analisis data.					
13.	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada Instansi/Lembaga tempat saya bekerja terdapat relevansi/kesesuaian sistem dalam hal pengolahan dan penyimpanan data.					
14.	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada Instansi/Lembaga tempat saya					

	bekerja terdapat relevansi/kesesuaian sistem terhadap user (pengguna).					
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Iin Rohmadani (2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Adah, S. ', & Nasrullah, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. In *Jurnal Akuntansi Publik* (Vol. 1, Issue 1). www.bpk.go.id
- Adietia. (2021). *Pengenalan Singkat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Perencanaan*. <https://bappeda.babelprov.go.id/content/pengenalan-singkat-sistem-informasi-pemerintahan-daerah-sipd-perencanaan>
- Armel, R. Y. G. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)*. 4.
- Badan Kepegawaian Negara. (2013). *Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 7 Tahun 2013*.
- Hafni Sahir, S. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati, Ed.; I). KBM INDONESIA. www.penerbitbukumurah.com
- Hendra, A., & Marja Sinurat, dan. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389>
- Irafah, S., Nurmala Sari, E., & Muhyarsyah. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337–348. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.21775>
- Kemendagri. (2019). *Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah*.
- Maksyur, N. (2015). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)*. 2.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (II). ANDI Yogyakarta.

- Mulyati, E., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7).
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurpala, & Arrozi. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 11. <https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.xxxx>
- Pemerintah Pusat. (2008). *Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, VI.
- Rohmadani, I. (2023). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021*.
- Ruky, A. S. (2013). *Sistem Manajemen Kinerja*. Gramedia.
- Sudiarianti, N. M., Ulupani, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SERTA IMPLIKASINYA PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*.
- Sukardi. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, Edisi Revisi* (R. Damayanti, Ed.). Bumi Aksara.

- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusa Media.
- Syifa Nurillah, A., & Muid, D. (2014). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. www.bpk.go.id
- Ulfa, R. (2021). VARIABEL PENELITIAN DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN. *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*.
- Vitriana, N., Ahyaruddin, M., & Agustiawan. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). *DIGIBIS: Digital Business Journal*, 1(1). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis>
- Widayanti, Y. (2019). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung)*.
- Yulianda, D., Lubis, N. K., & Azhar, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengguna, Teknologi Informasi dan Implementasi SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. 3, 794–804.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). *FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*.

